

HUBUNGAN GEREJA DENGAN PEMERINTAH

*(Studi Historis Kritis Roma 13:1-7 Dan Wahyu 13, Serta Relevansinya Bagi
Kehidupan Gereja Masa Kini Di Indonesia).*



Disusun oleh :
Bangun Marozha Sitohang
NIM: 50080226

PROGRAM PASCA SARJANA TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2011

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul:

HUBUNGAN GEREJA DENGAN PEMERINTAH

*(Studi Historis Kritis Roma 13:1-7 dan Wahyu 13, serta Relevansinya bagi
Kehidupan Gereja Masa kini di Indonesia).*

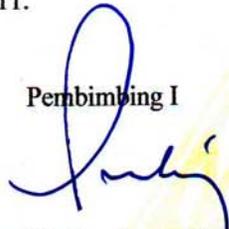
Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Bangun Marozha Sitohang

50080226

Dalam sidang tesis Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Duta Wacana untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Theologiae (M.Th) pada tanggal 23 Februari 2011.

Pembimbing I



Pdt. Robinson Radjagukguk, MST, ThM, PhD

Pembimbing II



Pdt. Robert Setio, PhD

Dewan Penguji :

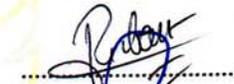
1. Pdt. Paulus Widjaja, MAPS. PhD

:



2. Pdt. Robert Setio, PhD,

:



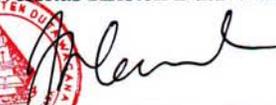
3. Pdt. Robinson Radjagukguk, MST, ThM, PhD

:



Disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana




Pdt. Yahya Wijaya, PhD

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bangun Marozha Sitohang

NIM : 50080226

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya. Di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Februari 2011



Bangun Marozha Sitohang

KATA PENGANTAR

Tesis ini lahir dari kegelisahan penulis akan realitas hidup gereja dan pemerintah di Indonesia akhir-akhir ini. Realita hidup yang tidak menjanjikan syalom bagi masyarakat sekarang ini, tentu menuai kritik bagi gereja dan pemerintah. Hubungan gereja dan pemerintah tetap aktual di mana dan kapan saja, sejak gereja ada di dunia ini sampai akhir zaman. Dan karena hal ini selalu menjadi persoalan yang menantang, khususnya di Indonesia, di mana gereja adalah kelompok minoritas yang amat banyak mengalami pasang surut hubungannya dengan pemerintah, maka tema ini menurut penulis sangat penting untuk dituliskan dalam tesis ini.

Menyadari bahwa proses kuliah dan penulisan tesis ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang tak ternilai dan tak terbalas, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis untuk menggapai keberhasilan ini:

1. Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D selaku Direktur Program pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana yang telah membekali dan memfasilitasi penulis dengan sejumlah ilmu pengetahuan.
2. Pdt. Robinson Radjaguguk, MST,ThM,Ph.D sebagai dosen Pembimbing satu dan penguji, yang setia memberikan bimbingan dan pikiran-pikiran kritis dan konstruktif untuk mengisi dan menyempurnakan tesis ini. Beliau telah banyak meluangkan waktu untuk membaca dan mengoreksi tesis ini, meski di tengah-tengah jadwal yang sangat padat. Semoga Tuhan selalu memberkati pekerjaan, karya pelayanan dan keluarga Bapak.
3. Pdt. Robert Setio, Ph.D selaku pembimbing dua dan penguji, yang memberikan pikiran-pikiran kritis untuk menyempurnakan tesis ini. Terima kasih untuk proses

bimbingan yang telah mengarahkan pikiran saya dalam proses meramu dan mengkonstruksi tesis ini.

4. Seluruh staf pengajar PPST UKDW Yogyakarta. Terima kasih untuk materi-materi kuliah, juga metode mengajarnya. Semoga ilmu yang sudah dibagikan dapat terus saya kembangkan untuk kubagikan di dalam pelayanan kelak.
5. Bapak Edison Sitohang dan ibu Gustaria br Simanjuntak (+), keluarga dan saudara-saudaraku (keluarga: b'Posman, b'Esron, b'Benget, ito Arlina, ito Mawati, ito Masta, ito Jurita), teristimewa ito Arlina dan Jurita. Mereka selalu mendukung dan menyebut namaku dalam doanya. Keberhasilanku ini 'ku persembahkan kepada kalian.
6. Bapak Drs. Robert Butar-butar br Harianja, Bapak Ir. Bernhard Panjaitan br Silaen, Bapak Hombar Sibarani, SH br Manullang, Bapak S.D.Silitonga br Silalahi, Bapak St. H.A.U. Pasaribu, Bapak St. B. Gurning, SPd br Galingging, Bapak Simanungkalit br Tambunan, Bapak Simanjuntak br Silitonga, Bapak O. Sirait br Simbolon, Bapak Darius Padang, SE br Simanjuntak, Bapak Ir. K. Siagian br Panjaitan, Ibu Pakpahan br Sinaga, Ibu Munthe br Purba, Ir. Tultul Barbarosa Sitohang, SE, MM br Sibarani, Bapak Sahala Panggabean MBA br Situmorang, Bapak Drs.Tunggul D. Sihotang br Situmorang. Bapak R. Pontas. Samosir br Sitohang, Bapak Efron Purba, Bapak St.H.M.Silitonga br Aritonang, Bapak Yusuf Manullang br Simangunsong, Bapak Patar Simanjuntak, MBA br Simarmata, Bapak Hakim Pardede br Hutapea. Keberhasilanku ini juga 'ku persembahkan kepada kalian, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tak bertepi, sehingga semua proses studiku bisa berjalan dengan baik.

7. Karyawan dan karyawan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang sangat ramah dalam melayani kebutuhan-kebutuhan penulis selama studi, secara khusus Mb'Yuni, dan Mbak Tias.
8. Karyawan dan karyawan Perpustakaan Kolese Ignatius dan Perpustakaan UKDW, yang telah membantu saya untuk mendapatkan literatur yang dibutuhkan pada saat perkuliahan dan penulisan tesis ini. Pelayanan kalian sangat berharga bagiku.
9. Teman-teman Mahasiswa Pasca Sarjana UKDW, teristimewa angkatan 2008, yang terus berjuang dengan semangat tanpa mengenal lelah. Terima kasih untuk kebersamaan dan diskusi-diskusi segarnya selama ini.

Akhirnya, untuk semua pihak yang tak disebutkan dengan bantuan yang tak terbalaskan, penulis ucapkan terima kasih banyak. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 7 Februari 2011

Penulis

Bangun Marozha Sitohang

ABSTRAKSI

SITUASI hubungan gereja dan pemerintah di Indonesia akhir-akhir ini mengalami ketegangan, khususnya yang berhubungan dengan masalah kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah. Tertarik dengan kondisi tersebut, penulis dalam tesis ini membahas hubungan gereja dan pemerintah dalam konteks historis Surat Roma 13: 1-7 dan Wahyu 13, serta membahas relevansinya terhadap kehidupan gereja-gereja di Indonesia masa kini.

Berdasarkan penelitian ini, terungkap bahwa di dalam Perjanjian Baru terdapat dua sisi pandang yang berbeda tentang sikap orang Kristen terhadap pemerintah. Walaupun konteks historisnya berbeda, tetapi keduanya tidak bertentangan. Ketaatan yang diajarkan Paulus dalam Roma 13 mengandung sikap positif terhadap pemerintah. Sedangkan Yohanes dalam Kitab Wahyu 13 memiliki sikap negatif, karena pemerintah Roma telah berubah menjadi musuh Allah dan mengancam kehidupan gereja. Sikap Yohanes tersebut memiliki alasan jelas dan bukan mau menentang sikap positif Paulus dalam Roma 13. Tetapi justru mau mengimbangi sikap orang Kristen terhadap pemerintah dalam Roma 13. Selain itu, Yohanes memiliki argumentasi yang berbeda tetapi tidak bertentangan. Ketaatan kepada pemerintah harus direalisasikan berdasarkan *suneidesis* (suara hati), akal budi, pikiran yang kritis dan tidak membabi buta. Atau bukan karena takut terhadap hukuman dan ancaman dari pemerintah, tetapi karena ketaatan dan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Allah.

Situasi hubungan gereja dan pemerintah yang mengalami ketegangan di Indonesia akhir-akhir ini dihadirkan sebagai relevansi, khususnya yang berhubungan dengan kasus kebebasan beragama. Dalam hal ini agaknya gereja kurang mampu menunjukkan ketaatannya secara sungguh-sungguh ketika menghadapi persoalan yang datang dari masyarakat dan pemerintah. Karena itu perlu dipertanyakan, mengapa gereja tidak mampu menunjukkan imannya secara jelas pada saat mengalami dilema dengan pemerintah? Mungkin pemahaman gereja tentang arti ketatatan dalam Roma 13 dan Wahyu 13 belum memadai. Di sisi lain, mungkin juga pemerintah kurang memahami peranannya sebagai hamba Allah dan melewati batas-batas yang seharusnya dicampuri secara langsung ke dalam gereja.

Oleh karena itu, alangkah baiknya jika gereja dan pemerintah memahami eksistensi masing-masing dan saling menghargai hak-hak sesamanya sesuai dengan aturan dan peraturan, undang-undang, hukum serta ideologi yang berlaku di dalam negara dan gereja itu sendiri. Pada akhirnya diharapkan, di negara ini tercipta hubungan yang harmonis antara gereja dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. ***

ABSTRACT

Relationship between church and government in Indonesia was recently in a strained situation, particularly related to the issue of religious freedom and the construction of worship building. Interested to such issue, researcher addresses the relationship between church and government in a historical context of the Epistles of Romans 13:1-7 and Revelation 13, as well as examines its relevance to the life of churches in this country today.

Based on the study, it is revealed that in New Testament, there were two different points of view on attitudes among Christians to government. Despite the different historical contexts, both were not in conflict. Obedience taught by Paul in Romans 13 contained positive attitude to government, and Yohn in Revelation 13 does positive attitudes, because Rome government changed to be the enemy of God and threaten the life of churches. The attitude of John has obvious reason and will not oppose the positive attitude of Paul in Rome 13. In addition, John has different argumentation, but it was conflict one. Obedience to a government should be realized based on conscience (*suneidesis*), reason, critical and foolhardy mind. It was not also because of being afraid to punishment and threat imposed by government, but of sincere obedience and loyalty to God.

The strained situation of relationship between church and government in this country was recently relevant, particularly in relation to the issue of religious freedom. In the case, churches were less able to sincerely show obedience to God as facing problems from society and government. Therefore, a question should be asked, 'Why churches were unable to obviously show their creed as they faced the dilemmas with government?' It is possible that among them understanding on the meaning of obedience in Romans 13 and Revelation 13 was inadequate in one hand, while on the other hand, government suffered lack of understanding concerning its role as the servant of God and intemperance that should be not directly done by the churches.

Therefore, church and government should understand the existence of each and appreciate rights with each other in accordance with the prevailing regulation, act, law, and ideology in both state and church as well as. Finally, it is expected that in the country, a harmonious relationship between church and government could be established among plural society.

DAFTAR ISI

Lembaran Judul	
Lembaran pengesahan	i
Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstraksi	vi
Daftar Isi	ix

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Alasan Memilih Judul	12
1.4. Tujuan Penulisa	13
1.5. Hipotesa	14
1.6. Metode Penulisan.....	15
1.7. Sistematika Penulisan	16

BAB II

STUDI EXEGETIS ROMA 13 : 1-7

2.1. Latar Belakang Surat Roma	18
2.1.1. Rasul Paulus	18

a. Sebagai Orang Yahudi	18
b. Sebagai Yahudi Fanatik	20
c. Panggilan Bagi Bangsa-bangsa Non Yahudi	26
d. Sebagai Warga Negara Roma	27
2.1.2. Kekaisaran Romawi Pada Masa Paulus	29
a. Situasi Politik	30
b. Sistem Pemerintahan	32
c. Situasi Sosial Ekonomi	34
2.1.3. Konteks Kehidupan Sosial Jemaat Roma	37
2.1.4. Penulisan Surat Roma	40
2.2. Tafsiran Surat Roma 13: 1-7	45
a. Kesenambungan Nas ke Depan dan ke Belakang	45
b. Tafsiran ayat demi ayat	47
c. Kesimpulan	62

BAB III STUDI EXEGETIS WAHYU 13

3.1. Latar Belakang Kitab Wahyu	64
3.1.1. Penulisan Kitab Wahyu	64
a. Penulis	64
b. Tempat Penulisan	70
c. Waktu Penulisan	71
3.1.2. Konteks Kehidupan Sosial Jemaat-jemaat Asia Kecil	73
3.1.3. Tantangan gereja Pada Masa itu	78

a. Tantangan dari dalam jemaat	78
b. Tantangan dari luar jemaat	79
3.2. Tafsiran Wahyu 13	83
a. Kesenambungan nas ke depan dan ke belakang	83
b. Tafsiran ayat demi ayat	88
c. Kesimpulan	99

BAB IV

IMPLIKASI TEOLOGIS AJARAN PAULUS DAN JOHANES MENGENAI HUBUNGAN GEREJA DAN PEMERINTAH DI INDONESIA

4.1. Sikap Positif dalam Surat Roma	103
4.2. Sikap Negatif dalam Surat Wahyu	112
4.3. Hubungan Gereja dan Pemerintah : Dialog dengan Para Teolog Indonesia	122
4.3.1. T.B. Simatupang (Alm)	122
4.3.2. Eka Darmaputra (Alm)	124
4.3.3. Andreas A. Yewangoe	127

BAB V

RELEVANSI STUDI ROMA 13 :1-7 DAN WAHYU 13 DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN GEREJA DAN PEMERINTAH DI INDONESIA

5.1. Ideologi Negara di Indonesia	130
5.2. Gereja dan Masyarakat majemuk	131
5.3. Peranan Gereja dalam Pembangunan	133
5.4. Kemandirian dan Kebebasan Gereja di Indonesia	136

5.5. Pemerintah Sebagai Hamba Allah139

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN.....145

BAB VII

DAFTAR PUSTAKA150

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah gereja mencatat bahwa gereja sebagai perwujudan Tubuh Kristus di dunia ini berhadapan dengan berbagai institusi dan ideologi. Gereja sebagai lembaga keagamaan mungkin dinilai sementara orang merupakan fenomena sosial belaka, dan oleh karena itu sama seperti organisasi massa di sekitarnya. Namun sebagai persekutuan yang dibentuk oleh Roh Kudus dan perwujudan Tubuh Kristus, gereja tetap memahami bahwa dirinya mempunyai nafas dan sistem organisasi yang didasarkan pada ajaran Alkitab.

Kehidupan gereja sebagai persekutuan orang percaya yang diatur dalam suatu organisasi keagamaan di dunia ini, tentu berhadapan dengan pemerintah di mana gereja itu berada. Dalam hal ini secara institusional gereja berada dalam wilayah kekuasaan pemerintah. Sehingga dalam beberapa hal penting gereja harus taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di negara itu. Namun pada pihak lain, negara yang bukan negara agama harus juga menyadari batas-batas yang dapat dilakukan terhadap gereja. Negara/pemerintah harus menyadari eksistensi gereja bukan didasarkan pada ideologi, melainkan didasarkan pada teologi Alkitabiah. Artinya, gereja dan negara pada dasarnya mempunyai azas dan tujuan yang berbeda.

Walaupun negara dan gereja berbeda, namun di dalam masyarakat yang majemuk dan kompleks seperti Indonesia, jelas bahwa di berbagai hal terjalin hubungan dan kerja sama yang positif untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang sudah merupakan kenyataan yang

tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian warga negara dan beberapa pemimpin dalam negara adalah sekaligus merupakan warga dan tokoh gereja. Dari sini muncullah dua hal yang harus ditangani secara sungguh-sungguh yaitu: *pertama*, warga negara yang juga warga gereja perlu memiliki dasar-dasar teologi dan etika yang kokoh, agar dapat menempatkan diri secara benar dalam hubungan gereja dengan pemerintah. Warga gereja harus mengetahui sejauhmana ia taat kepada pemerintah dan kemauan politik pemerintahnya. *Kedua*, gereja dengan pemerintah perlu terus menerus melakukan dan memelihara dialog untuk memahami sejauhmana interrelasi keduanya. Artinya, pemerintah dan pejabat gereja perlu mengetahui sejauhmana dan bagaimana pemerintah melibatkan diri dalam urusan gereja dan sebaliknya. Dengan demikian pemerintah tidak terjebak dalam intervensi yang mencemarkan kesucian gereja sebagai persekutuan yang sakral.

Kemelut yang pernah terjadi di salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara dapat diambil sebagai contoh, dimana orang Kristen mengalami ketegangan untuk mengambil sikap iman yang bertanggungjawab. Kasus HKBP yang telah dicampuri secara langsung oleh pemerintah, menjadi sorotan serius bagi umat Kristen di Indonesia. Demikian juga dengan kasus pembangunan rumah ibadah, hingga saat ini terkesan kurang menunjukkan kebebasan dan keadilan bagi semua masyarakat dan hal itu dapat dilihat sendiri, bagaimana pemerintah menyikapi bangunan gereja yang ditutup, sangat kurang perhatian membela kebebasan beragama. Padahal, dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 2006 dan No.8 tahun 2006 memiliki posisi yang sangat jelas. Dalam PBM disebutkan bahwa “hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun serta setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya.”¹
Artinya apa? Pemerintah semestinya bersikap positif terhadap usaha-usaha pendirian rumah ibadah, karena beribadah adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Seperti warga HKBP Filadelfia, hingga saat ini terlunta-lunta untuk beribadah di gereja. Demikian laporannya:

Pada tahun 2003 HKBP Filadelfia membeli tanah kapling dan membangun dua ruko dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No 10095 dan No. 10096 tertanggal 21 Oktober 2003, yang berlokasi di Perumahan Villa Bekasi Indah 2, Desa Sumbar Jaya, untuk dijadikan tempat beribadah. Namun, pada saat dilaksanakan ibadah, warga masyarakat menolak ruko tersebut dijadikan tempat beribadah. Kemudian warga jemaat kembali beribadah di rumah-rumah. Ketika beribadah di rumah-rumah pun kerap mendapat gangguan. Pada April 2006, jemaat HKBP Filadelfia kembali dilarang melaksanakan ibadah di rumah yang ada di blok C Perumahan Villa Bekasi Indah II dan secara keseluruhan di Perumahan Villa Bekasi Indah II. Karena dilarang beribadah di rumah dengan alasan mengganggu masyarakat sekitar, akhirnya disepakati untuk mencari lahan tempat beribadah/pendirian gereja. Tanggal 15 Juni 2007, HKBP Filadelfia membeli lahan/tanah dari Sumiati, sebagai pemilik tanah. Saat itu, disampaikan bahwa tanah tersebut dibeli untuk peruntukan pembangunan gereja. Pemilik dan ahli warisnya setuju dengan membuat pernyataan yang disaksikan beberapa warga masyarakat dan kepala desa yang turut membuat surat pernyataan setuju. Tanah bersertifikat Hak Milik No.1491 tertanggal 26 September 2007 itu dikeluarkan BPN Kabupaten Bekasi. Setelah tanah dibeli, pengurus gereja pun mencari dukungan dari masyarakat setempat,

¹Bnd. Suhadi Cholil dkk, “Sumber Ketegangan: Rumah Ibadah dan Wacana Penyesatan” dalam *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia 2009*, Center For Religius & Cross-Cultural Studies, CRCS, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Januari 2010), p.33: di sana dilaporkan ada 18 kasus seputar rumah ibadah tahun 2009, ada tiga kasus aparat pemerintah membongkar gedung rumah ibadah.

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No.8 tahun 2006 yaitu pemohon (yang beragama Kristen) 90 jiwa, dan di luar pemohon (Islam, Hindu dan Budha) 60 jiwa. Dukungan dari masyarakat setempat pun mengalir disertai tanda tangan sebagai buktinya. Berbekal dukungan itulah, akhirnya pada 2 April 2008, Kepala Desa Jejalen Jaya mengeluarkan rekomendasi izin pendirian gedung gereja HKBP Filadelfia yang kemudian ditujukan kepada Bupati Bekasi, Kepala Departemen Agama Kabupaten Bekasi, FKUB Kabupaten Bekasi dan Camat Tambun Utara. Alhasil, hingga kini perjuangan jemaat HKBP Filadelfia Resort Duren Jaya, Desa Jejalen Jaya, RT 01/RW 09, kecamatan Tambun Utara, Bekasi Jawa Barat, untuk beribadah di gereja masih terkatung-katung.²

Terkait dengan gangguan dan penutupan gereja-gereja pada umumnya, dan HKBP pada khususnya, dalam pertemuan dengan walikota Bekasi, Ephorus Pdt.Dr.Bonar Napitupulu (Pimpinan tertinggi HKBP) menyuarakan kepada Pemimpin Negara bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di setiap jengkal nusantara ini. “Sebab itu, tidak ada siapa pun yang berhak, di negara Pancasila ini, melarang orang untuk beribadah.”³ Kalau ternyata pemerintah Indonesia mengadakan intervensi yang serius dalam masalah intern gereja sebagai institusi keagamaan, maka hal itu akan menjadi preseden yang buruk di kemudian hari dan ini menjadi tantangan serius dalam kehidupan gereja-gereja di Indonesia.

Memang harus diakui, bahwa gereja seringkali menggunakan teks tertentu sebagai titik tolak kekuatannya dalam hubungannya dengan pemerintah (mis. Roma 13: 1-7). Walaupun pemahaman terhadap perikop tersebut sangat bervariasi, namun

² Victor Ambarita, “Warga HKBP Filadelfia Terlunta-lunta”, *Majalah Suara HKBP*, Edisi 57, 2010, p.38.

³ Victor Ambarita, “Ephorus HKBP Bertemu Walikota Bekasi”, *Suara HKBP*, pp.36-37.

secara umum gereja memandang bahwa pemerintah adalah alat yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga gereja mesti taat kepada pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga sering menggunakan perikop ini untuk melegitimasi dukungan gereja kepadanya.

Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa desakan-desakan terhadap gereja untuk mewujudkan suara kenabiannya, membuat gereja mau tidak mau harus berbuat sesuatu. Walaupun kita masih skeptis tentang apakah kita sudah berada di era demokrasi, tetapi bagaimana pun gereja harus mengambil prakarsa untuk ikut menciptakannya.⁴ Situasi saat ini menyebabkan pemerintah selain mengalami kesulitan dalam mengakomodasi tuntutan rakyat terhadap perubahan dan dibayangi oleh krisis legitimasi, juga akan menghadapi tantangan lain yang tak kalah peliknya, yaitu berkembang dan meluasnya gerakan radikal, yang pada titik tertentu dapat menjurus ke situasi *chaos* (kacau) dan anarkhis. Situasi *chaos* dan anarkhis akan semakin berkembang dalam skala yang lebih luas dan lebih *intens*, apabila mayoritas masyarakat masih terhimpit beban hidup yang berat akibat berlarut-larutnya krisis ekonomi dan situasi inilah yang tampak tengah terjadi di Indonesia saat ini.⁵

Berangkat dari situasi yang telah dipaparkan di atas, maka muncul pertanyaan-pertanyaan: apakah gereja dalam situasi seperti itu turut mempersalahkan pemerintah? Apakah fungsi kenabian gereja saat ini dinampakkan benar-benar, mengingat panggilan pelayanannya untuk berjuang bersama pemerintah? Bagaimanakah gereja membangun relasi dengan pemerintah dalam situasi yang “*chaos*” seperti ini? Apakah ketaatan kepada pemerintah merupakan sesuatu yang mutlak, karena pemerintah ditetapkan oleh

⁴A.A. Yewangoe, *Partisipasi Kristen dalam Era Baru dalam Gereja dan Reformasi* (Jakarta: Yakoma PGI, 1999), p.166.

⁵ Sularto, *Refleksi Agenda Reformasi* (Yogyakarta, Kanisius, 1999), pp.24-25.

Allah? Ataukah ketaatan itu tidak mutlak, karena pemerintah adalah manusia yang dapat melakukan kesalahan sebagaimana yang digambarkan dalam Wahyu 13? Atau karena melihat kedudukan pemerintah sebagai yang berada di bawah Allah, maka Allahlah yang mutlak untuk dipatuhi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, supaya dapat memahaminya, tentu keadaan tersebut tidak dapat terpisah dari konteks dimana pernyataan itu diberikan.

Roma 13:1-7 secara eksplisit berbicara tentang ketaatan kepada pemerintah. Dalam Roma 13:1 dikatakan: “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah”.⁶ Secara sederhana ungkapan itu dapat berarti bahwa ketaatan kepada pemerintah itu mutlak. Namun apakah ayat itu dapat dipahami seperti itu? Apakah Paulus memang bermaksud agar orang-orang Kristen taat kepada pemerintah Romawi tanpa sikap kritis? Apakah sebenarnya maksud Paulus dengan ungkapan “sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah”? Bukankah Paulus sendiri mengetahui dengan jelas, bahwa penguasa-penguasa Romawi menyembah dewa (tidak beribadah kepada Allah) dan sering mengambil tindakan yang merugikan orang Kristen? Walaupun Paulus mempunyai pengalaman yang buruk terhadap pemerintah, tetapi mengapa ia menyuarakan sikap yang positif terhadap pemerintah?

Paulus mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah (*qeou/ ga.r dia,kono,j evstin*) “untuk kebaikanmu” (ay.4) dan dalam ayat 6, pelayan-pelayan Allah (*leitourgoi. ga.r qeou/ eivsin*). Arti kata *dia,kono,j*

⁶ Bnd. Alkitab Dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari, LAI, “Setiap orang haruslah taat kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah”. Untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah “taat” daripada “takluk”.

(*diakonos*) adalah hamba yang melayani pada meja.⁷ Dalam upaya melaksanakan tugas sebagai “hamba”, maka pemerintah menyandang pedang (ay.4). Pedang adalah simbol dari kuasa yang dimiliki oleh negara untuk memutuskan hukum terhadap seseorang. Jadi pedang yang disandang menunjuk kepada kekuasaan pengadilan untuk melindungi kebenaran dan melawan kejahatan dan bukan untuk memeras dan menindas rakyat. Lebih lanjut Paulus menjelaskan fungsi pedang yang disandang pemerintah yakni “membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat” dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah.

Kemudian Paulus menyebut pemerintah adalah pelayan-pelayan Allah (ay.6) (*leitourgoi. ga.r qeou/ eivsin*), suatu istilah yang menunjuk kepada orang yang melakukan pelayanan umum untuk negara. Di Yunani Kuno, seringkali seorang pelayan secara gratis melakukan pelayanan umum di kantor-kantor umum, khususnya pelayan-pelayan keuangan.⁸ Selain itu, kata *leitourgoi. (leiturgoi)* menunjuk juga pada seorang “pelayan kultus”, seseorang yang aktif dalam melayani Allah (Yes. 61:6; Neh.10:40; bnd. Rm.15:16; Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan Kristus). Dari pengertian di atas, apakah istilah *leitourgoi. (leiturgoi)* ini tidak bertentangan dengan para penguasa tertinggi pada zaman Paulus? Kalau kita kembali melihat kepada latar belakang Romawi, bahwa rakyat taat terhadap rajanya yang ditunjukkan dalam kultur Kaisar. Apakah Paulus mempersoalkan ketaatan kepada pemerintah secara langsung, atau ketaatan itu ditempatkannya dalam kerangka yang sama sekali baru dengan menyebut pemerintah adalah “pelayan-pelayan Allah”?

⁷ Herman W. Beyer, “*dia, kono, j*” (*diakonos*) dalam Gerhard Kittel (ed.), *Theological Dictionary of the New Testament, Volume II A-H* (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), pp.87-89.

⁸H. Strathmann, “*leitourgoi*” (*leiturgoi*) dalam Gerhard Kittel (ed.) *Theological Dictionary of the New Testament, Abridged in One Volume* (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), pp.528-529.

Bukankah sebutan pelayan, juga merupakan sebutan yang tidak layak bagi pemerintah pada saat itu?

Paulus juga mengingatkan bahwa pemerintah pada dirinya bukanlah suatu lembaga ilahi, tetapi lembaga biasa yang hanya dapat berlangsung di bawah kekuasaan Allah. Ketaatan yang dimaksud oleh Paulus bukanlah ketaatan tanpa batas atau ketaatan yang buta kepada perintah penguasa. Kasemann mengatakan bahwa “ketaatan menunjukkan suatu ketaatan bebas, yang menekankan fakta bahwa kehendak ilahi mengatur dunia yang diciptakanNya dan mewajibkan adanya ketaatan, terlepas adanya keburukan dalam kehidupan masyarakat.”⁹ Oleh karena itu, perikop ini bisa juga ditujukan untuk pembebasan, terutama kepada budak-budak Kristen dan wanita yang menginginkan kesetaraan terutama dalam rumah tangga.¹⁰ Atau kemungkinan bagi Paulus, ketaatan orang Kristen kepada penguasa-penguasa memiliki makna yang khusus. Orang Kristen menaati mereka supaya tidak bertentangan dengan kehendak Allah.¹¹ Darwin Lumban Tobing mengatakan bahwa “ketaatan itu tidak boleh dipahami secara sepihak, tetapi harus ditempatkan bersamaan dengan ketaatan kepada Allah, sebab pada satu sisi pemerintah atau penguasa harus memahami bahwa kuasa yang ada padanya adalah dari Allah dan bukan dari dirinya sendiri.”¹²

Berbeda dengan Rasul Paulus, penulis kitab Wahyu (khususnya dalam Wahyu 13) dengan menggunakan bahasa apokaliptik, menggambarkan pemerintah sebagai binatang dengan penuh kesombongan, “menghujat Allah”, “berperang melawan orang-orang kudus”, bahkan dalam Wahyu 13:8, penulis berkata, “semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak

⁹ Ernst Kasemann, *Commentary on Romans* (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), pp.350-352.

¹⁰ Ibid.

¹¹ C.E.B.Cranfield, *A Shorter Commentary Romans, Vol.II* (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), p.662.

¹² Darwin Lumban Tobing, *Teologi di Pasar Bebas* (Pematangsiantar: L-SAPA, 2007), p. 263.

dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih. Siapa yang tidak menyembah (ay.15) dan yang tidak mempunyai tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya (ay.16-17) akan dibunuh. Dalam pikiran penulis Wahyu, pemerintah sudah menjadi serigala kepada mereka yang tidak taat dan tidak menyembahnya. Gambaran binatang dalam Wahyu 13 merupakan perlambang dari pemerintah (kaisar), yang pada saat itu mengkambing-hitamkan umat Kristen dan mencelakai orang-orang dan umat Kristen.¹³

Sweet mengatakan bahwa binatang yang dijelaskan dalam Wahyu 13 ini merupakan alegori dari kekaisaran Romawi, dan binatang serta penghujatan yang dimiliki binatang tersebut merupakan propaganda okultisme dari kekaisaran.¹⁴ Kebengisan, kebobrokan dan kebuasan kaisar yang menentang Allah dengan mendewakan dirinya yang dilambangkan dengan seekor binatang (Why.13:2). Kekuasaan kekaisaran Romawi ditandai sebagai penjelmaan kekuasaan iblis dan merupakan ancaman yang paling menakutkan bagi orang-orang Kristen; sebab ternyata ada orang-orang Kristen yang mengkhianati perjuangan iman mereka, dan hal itu dirasakan oleh penulis kitab Wahyu lebih menyakitkan daripada kuasa pedang yang dilakukan pemerintah Romawi terhadap orang-orang Kristen.¹⁵

Kaisar disembah bersama-sama dengan si Iblis yaitu “naga besar” (Why.12:3,9) yang berusaha menarik ketaatan yang hanya layak diberikan orang Kristen kepada Kristus. Penyembahan yang diberikan kepada kaisar itu adalah imitasi seperti penyembahan terhadap Kristus dan BapaNya (bnd.Why.13:4;5:11-13). Ini adalah bukti kecongkakan hati kaisar yang berani menuntut supaya pujian dan penyembahan yang

¹³ T.F.Glasson, *The Revelation of John: Commentary* (Cambridge: The University Press, 1965), p.79.

¹⁴ John Sweet, *Revelation* (London: SCM Press, 1979), p.207.

¹⁵ Ibid.

dipakai orang Kristen bagi Kristus menjadi pujian dan penyembahan bagi dirinya. Sikap kasar ini menunjukkan bahwa ia bukan lagi sekedar menuntut loyalitas politik semata supaya orang-orang Kristen taat terhadap pemerintah, tetapi kaisar telah menuntut ketaatan orang-orang Kristen supaya tidak lagi menyembah Allah orang Kristen yang sesungguhnya.¹⁶ Oleh karena itu, orang-orang Kristen yang berani menolak secara tegas dan terus terang, dianggap sebagai oposisi pemerintah Romawi. Sebagai kaisar yang menganggap dirinya Allah, tidak menginginkan orang-orang Kristen menentang kekuasaannya. Orang-orang Kristen yang menentang perintah untuk menyembah patungnya, dianggap menentang secara politis.¹⁷ Sekalipun sebenarnya penentangan yang dilakukan orang-orang Kristen terhadap perintah kaisar adalah berdasarkan agama, bukan politis, tetapi kaisar telah mencampuradukkan lembaga kekuasaan kekaisarannya dengan agama yang dibentuknya sendiri, yaitu mengkultuskan dirinya sebagai dewa dan Tuhan. Tentu saja orang-orang Kristen tidak dapat menerima begitu saja apa yang diinginkan dan diperintahkan kaisar, sebab ajaran kekristenan yang mengaku hanya satu Allah tidak akan mampu menyebut dan mengakui kaisar yang bengis dan kejam sebagai Allah mereka; dan itu merupakan penghujatan terhadap keberadaan Allah (bnd.Ul.4:35; 6:4; 10:17; Yos.24:27; Mat.10:33; Why.13:6; 16:9), dan penyangkalan terhadap iman mereka sendiri (Why.2:13;3:8), sebab tidak ada seorang manusiapun yang dapat menipu Tuhannya (bnd.Ayb.13:9; Mal.3:8).

¹⁶ Bnd. G.E.Ladd, *A Commentary on the Revelation of John* (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), p.179.

Bnd. E.F.Scott, *The Book of Revelation* (London: SCM Press, 1940), pp.39-40.

¹⁷ Bnd. Th.van den End, *Harta Dalam Bejana* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), p.54; van den End melaporkan, "Tetapi mereka mencurigai sikap politis orang-orang Kristen. Maklum saja mereka ini menolak menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah dengan membakar dupa di muka patung kaisar seperti yang dilakukan oleh semua rakyatnya. Dan agamanya, yang bagi seseorang yang berpendidikan hanya merupakan takhyul yang keras, memuncak dalam harapan akan datangnya suatu kerajaan lain".

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, maka studi tesis ini akan memberikan perhatian pada dua hal: *pertama*, tafsir kritis terhadap Roma 13:1-7 dan Wahyu 13, untuk memahami secara mendalam apa arti dan makna teks bagi orang-orang Kristen yang menjadi si alamat asli surat-surat tersebut. *Kedua*, merefleksikannya dalam konteks kehidupan gereja-gereja di Indonesia. Kedua upaya ini sama pentingnya, karena walaupun Paulus dan Yohanes menulis kepada komunitas Kristen tertentu dan dalam situasi yang tertentu pula, tetapi juga dapat dipergunakan oleh gereja dalam membangun relasi gereja dengan pemerintah dan memperkaya sikap kritis gereja terhadap pemerintah pada masa kini. Orang Kristen harus memahami kehadirannya sebagai bagian integral dari negara di dunia ini. Dalam hal inilah setiap orang harus menunjukkan ketaatannya kepada pemerintah. Muncul pertanyaan, ketaatan yang bagaimanakah yang harus dimiliki orang Kristen? Apakah ketaatan tersebut karena terpaksa, atau ketaatan yang buta? Ataupun ketaatan yang berdasarkan suara hati, yang diwujudkan melalui sikap kritis, tulus dan ikhlas? Secara tegas harus ditolak pendapat orang-orang yang memakai Roma 13: 1-7 untuk menggiring orang Kristen kepada ketaatan seorang budak. Ajakan Paulus tentang ketaatan kepada pemerintah dalam Roma 13: 1-7 tentu dalam konsep ketaatan sebagai anak-anak Allah, bukan seperti seorang budak (bnd. Rm. 8: 15; 2 Tim.1: 7). Secara tegas, Yohanes menyerukan kepada orang-orang Kristen agar tidak berkompromi, berkolaborasi atau tunduk kepada pemerintah yang jahat. Orang-orang Kristen harus mampu menghadirkan keselamatan yang dari Allah melalui kesaksian imannya. Sebab dengan cara itulah orang-orang Kristen ikut serta di dalam karya Anak Domba yang telah mengalahkan kuasa iblis (bnd. Why.6:9; 3: 14; 12: 11). Dengan kata lain, orang-orang Kristen harus berani menghadapi ancaman penderitaan dan penganiayaan dengan tabah

dan iman yang teguh. Dengan demikian, tulisan Paulus dan Wahyu 13 ini hanya berguna bila dikembangkan dan direfleksikan dengan gereja dan dunia sekarang.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa Paulus dan Yohanes berbeda dalam memahami kedudukan pemerintah? Apa yang melatarbelakangi mereka pada saat itu, sehingga pada satu sisi, Paulus menekankan ketaatan kepada pemerintah, dan juga melihat kedudukan pemerintah sebagai “*diakonos*” (hamba) dan “*Leiturgoi*” (pelayan-pelayan) Allah; dan di sisi lain, Yohanes melihat pemerintah sebagai sosok yang menakutkan dan menyesatkan?
2. Akhir-akhir ini hubungan gereja dengan pemerintah mengalami ketegangan, khususnya yang berhubungan dengan masalah intern gereja. Lalu, sikap yang bagaimanakah yang harus dimiliki oleh orang Kristen terhadap pemerintah di Indonesia masa kini? Apakah sikap taat dan kritis seperti yang disuarakan oleh Rasul Paulus, atau sikap yang ekstrim seperti yang disuarakan dalam Yohanes?

1.3. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis membahas masalah-masalah tersebut adalah, karena sangat aktual dalam meneropong hubungan gereja dengan pemerintah akhir-akhir ini di Indonesia yang mengalami ketegangan, khususnya berhubungan dengan masalah intern gereja dan kebebasan beribadah. Dalam situasi yang demikian, sebagai warga negara

Indonesia dan sebagai orang Kristen, gereja harus menentukan sikap kepada pemerintah.

Selain aktual, Roma 13:1-7 merupakan yang paling jelas secara eksplisit membahas mengenai hubungan gereja dengan pemerintah, dan dalam Wahyu 13 nampak suara nabiah untuk sikap berhati-hati maupun kritis terhadap pemerintah. Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka judul tesis yang akan ditulis adalah:

“HUBUNGAN GEREJA DENGAN PEMERINTAH”

*(Studi Historis Kritis Roma 13:1-7 dan Wahyu 13, serta Relevansinya bagi
Kehidupan Gereja Masa kini di Indonesia).*

1.4. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis bermaksud mendalami hubungan gereja dan pemerintah dalam konteks historis Roma 13:1-7 dan Wahyu 13. Di sini akan ditelusuri konteks historis Roma 13:1-7, dengan mengadakan tinjauan latar belakang kehidupan Paulus dan situasi kehidupan jemaat Roma. Sebab sangat menarik bahwa Paulus secara tegas menganjurkan kepada orang Kristen agar taat kepada pemerintah, padahal Paulus sendiri tidak mengetahui secara pasti situasi politik yang dihadapi jemaat Roma.

Pada pihak lain, pandangan penulis kitab Wahyu (khususnya dalam Wahyu 13) perlu digali dan ditemukan inti kesaksiannya untuk mengimbangi pemahaman optimistik Paulus terhadap pemerintah. Sebab Yohanes yang menghadapi secara langsung situasi politik dan kehidupan masyarakat di Asia kecil, dan yang sudah dibuang ke Patmos karena kesaksiannya, menasihatkan orang Kristen agar waspada

terhadap para penguasa yang mendewakan dirinya sendiri. Yohanes di sini memberikan gambaran yang berlawanan dengan apa yang digambarkan Paulus. Artinya kitab Wahyu memberikan sisi lain dari hubungan gereja dengan pemerintah, gereja harus memancarkan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dan wibawa pemerintah di dunia ini.

Sehubungan dengan itu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila, gereja perlu mengimplementasikan kedua ajaran tentang hubungan gereja dengan pemerintah secara benar dan konsisten. Dengan kedua penggambaran hubungan gereja dengan pemerintah tersebut, baik orang Kristen maupun pemerintah dapat menyadari batas-batas hak dan kuasa pemerintah yang dapat diterima oleh orang percaya.

Melalui tesis ini diharapkan akan terungkap pokok-pokok teologi (dalam Perjanjian Baru) tentang hubungan gereja dan pemerintah. Sehingga gereja tanpa ragu-ragu sanggup menunjukkan sikap iman yang jelas, tegas dan Alkitabiah dalam setiap perjumpaannya dengan penguasa dan kekuatan dunia. Artinya melalui pemahaman yang benar terhadap Roma 13:1-7 dan Wahyu 13, orang Kristen dapat mengimplementasikan imannya dalam kehidupan sosial politik di negara Indonesia.

1.5. Hipotesa

1. Diduga bahwa pada saat surat Roma ditulis, orang-orang Kristen berada dalam berbagai ketegangan dengan pemerintah, termasuk hubungan orang-orang Kristen dengan orang Yahudi yang baru kembali ke Roma, setelah peristiwa pengusiran oleh Kaisar Klaudius. Maka Paulus menyadarkan orang-orang

Kristen di Roma akan keberadaan mereka sebagai warga negara yang selalu membutuhkan pemerintah. Diduga juga bahwa ajaran Paulus untuk taat kepada pemerintah, adalah dalam kerangka yang baru, yaitu menempatkan pemerintah sebagai *diakonos* (hamba) dan *leiturgoi* (pelayan) Allah.

2. Diduga bahwa pada saat kitab Wahyu ditulis, Yohanes melihat komunitas Kristen diolok-olok dan pemerintah mewajibkan setiap orang untuk menyembah (patung) kaisar dan sudah banyak orang Kristen yang ditindas/dibunuh karena melawan penguasa tersebut. Oleh karena itu sikap yang dianjurkan oleh Yohanes agar waspada terhadap pemerintah, merupakan kritik atau sikap kritis orang Kristen terhadap pemerintah yang menganiaya mereka dan menasihati agar tetap setia kepada Allah yang hidup itu.

1.6. Metode Penulisan

Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode historis kritis. Metode ini melihat Alkitab sebagai kitab yang lahir dalam proses sejarah, oleh karena itu metode ini menaruh perhatian pada situasi yang digambarkan dalam kehidupan dan situasi yang melahirkan teks itu. Dalam hal ini teks berfungsi sebagai sebuah jendela yang melaluinya kita dapat memandang ke suatu periode sejarah tertentu.

Penulis menyadari bahwa setiap metode tafsir mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sebagaimana dikatakan oleh Kwok Pui Lan : “Metode historis kritis menyediakan ruangan yang lebih banyak untuk berdialog, oleh karena ia membedakan antara suara Allah dan suara-suara mereka yang telah menuliskan Alkitab. Namun

kekurangan metode ini lebih menaruh perhatian pada masa lampau”.¹⁸ Menyadari akan kekurangan metode tersebut, maka sesudah studi historis kritis nas, penulis akan memuat relevansi (studi kontekstual), untuk mencoba melakukan dialog antara Roma 13:1-7 dan Wahyu 13 dengan konteks pergumulan gereja dan pemerintah saat ini, sehingga jelas sejauhmana Roma 13:1-7 dan Wahyu 13 menjadi relevan bagi gereja sekarang dan di masa depan.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman terhadap tesis ini, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

- Bab I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, judul dan alasan memilih judul, tujuan penulisan, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Menguraikan studi exegetis surat Roma 13:1-7. Latar belakang kehidupan Paulus akan ditinjau dari sudut kewarganegaraannya maupun dari sudut teologinya (keagamaannya). Kemudian akan dibahas juga situasi historis jemaat Roma. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauhmana kehidupan sosial dan agama mereka dipengaruhi oleh kekuasaan Romawi. Atau apakah kekuasaan Romawi waktu itu menjadi tantangan bagi iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga melalui usaha ini akan diperoleh gambaran apa yang memotivasi Paulus menegaskan ketaatan kepada pemerintah? Setelah itu akan dilakukan

¹⁸Kwok Pui Lan, *Discovery The Bible In The Non World* (New York: Orbis Books, 1995), p.40.

penafsiran dengan menganalisa secara kritis dan rinci bagian demi bagian dalam perikop ini. Hal ini berguna untuk memperoleh pemahaman, sehingga menjadi jelas apa sebenarnya arti dan hakikat nas yang disuarakan Paulus kepada pembacanya.

Bab III Menguraikan studi exegetis Wahyu 13. Melalui tinjauan konteks historis Wahyu 13 ini, akan diuraikan pandangan kritis penulis kitab Wahyu terhadap pemerintah. Melalui studi eksegetis Wahyu 13 akan diperoleh pokok-pokok teologi tentang arti kuasa dan kekuasaan dunia dalam kehidupan umat percaya dalam penantiannya akan kerajaan Allah di masa eskhaton.

Bab IV Merupakan implikasi teologis ajaran Paulus dan Yohanes tentang hubungan gereja dengan pemerintah. Di sini juga akan diuraikan pandangan para teolog Kristen di Indonesia mengenai hubungan gereja dengan pemerintah. Bagaimana dan sejauhmana orang Kristen melibatkan diri di dalam masalah kebangsaan dan kenegaraan. Dengan kata lain melalui implikasi teologis, diperoleh petunjuk sejauhmana interrelasi gereja dengan pemerintah dapat dikembangkan dan dipelihara secara kritis berdasarkan Roma 13:1-7 dan Wahyu 13.

Bab V Merupakan relevansi dari tesis ini dalam kehidupan gereja masa kini di Indonesia di dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab.

Bab VI Berisi kesimpulan dan saran dari hasil studi Roma 13:1-7 dan Wahyu 13, untuk memperkaya pemahaman akan sikap gereja kepada pemerintah di Indonesia.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah membuat studi terhadap Roma 13: 1-7 dan Wahyu 13, dan menghadirkan pikiran-pikiran para teolog Kristen di Indonesia, maka tesis ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

Pemerintah adalah alat negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang berasal dari Allah. Pemerintah tidak akan memiliki kekuasaan jika Allah tidak mengaruniakannya dari atas. Sekalipun kekuasaan pemerintah berasal dari Allah (Rm.13:1), tetapi pemerintah tidak memiliki kuasa ilahi, dan kekuasaannya adalah terbatas. Dengan menyadari kekuasaannya yang terbatas itu, maka pemerintah harus rela dengan rendah hati menerima kritik dari gereja demi wibawanya sebagai hamba Allah.

Gereja sebagai lembaga keagamaan memang berada dalam wilayah kekuasaan pemerintah, tetapi hal itu tidak berarti berhak mencampuri semua hal dalam lembaga keagamaan itu. Ada bagian-bagian dari setiap lembaga keagamaan yang boleh dan yang tidak boleh dijamah oleh pemerintah. Pemerintah yang menjaga wibawanya sebagai hamba Allah, tentu tidak akan merampas hak-hak gereja yang menjadi hak Allah. Sebab gereja secara langsung berada di bawah kekuasaan Allah, bukan di bawah kekuasaan manusia atau pemerintah. Pemerintah hanya ditugaskan Allah untuk melindungi, menjamin keadilan dan kebenaran agar gereja dapat dengan bebas melaksanakan misinya di dunia ini demi kesejahteraan manusia. Kebebasan yang dimiliki gereja di dalam menjalankan tugas dan misinya tersebut adalah kebebasan yang diberikan oleh Allah.

Gereja sebagai suatu lembaga keagamaan yang sah dan berbadan hukum adalah perwujudan tubuh Kristus, yang memiliki aturan dan peraturan tertentu, serta memiliki kebebasan mengeluarkan suara, berorganisasi, dan menjalankan misinya sesuai dengan perintah Yesus Kristus (bnd. Mat. 28:19-20). Gereja bukanlah negara tetapi gereja adalah suatu lembaga yang bersifat kerohanian, yang hidup di dalam suatu negara, yang eksistensinya diakui oleh pemerintah.

Gereja dan pemerintah, melalui peranannya masing-masing, dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, kemakmuran dan kesejahteraan, sebagai karya Allah di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, jika kedua lembaga itu saling menghormati hak-hak sesamanya. Gereja harus menghargai pemerintah sebagai hamba Allah; dan sebaliknya pemerintah tidak boleh menginjak-injak dan merampas hak Allah di dalam gereja.

Gereja-gereja di Indonesia, harus taat secara kritis terhadap pemerintah, dan tidak akan melihat pemerintah sebagai musuh Allah, jika pemerintah itu benar-benar bertindak jujur, konsekuen, adil dan benar di dalam melindungi umat, mampu menjamin hak-hak azasi dan keagamaan bangsanya, termasuk orang-orang Kristen. Artinya, gereja yang taat secara kritis sebagaimana dimintakan Paulus dalam Roma 13:1-7, pasti akan menerima dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memperoleh kekuasaannya dari Allah untuk memelihara dan melindungi umat dari rasa kurang aman. Sekaligus dengan itu mereka juga akan berani menentang atau mengkritik pemerintah, jika pemerintah itu telah berubah menjadi musuh Allah, misalnya melakukan dan mengizinkan penganiayaan serta penindasan terhadap umatNya (bnd. Why.13).

Pemerintah bisa saja dipergunakan iblis untuk memusuhi Allah, sehingga menjadi congkak dan menentang kehendak Allah, yaitu dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak jujur, sehingga hubungan gereja dan pemerintah menjadi tidak harmonis dan kacau balau. Dalam hal ini, pemerintah harus selalu sadar dan waspada supaya terhindar dari kemungkinan perhambaan iblis dan menjadi musuh Allah. Untuk itu, pemerintah haruslah tetap merendahkan dirinya, sebab kekuasaannya tetap berada di bawah kuasa Allah.

Gereja-gereja di Indonesia, yang masih menghadapi pergumulan dalam mendirikan rumah ibadah di beberapa wilayah, secara tegas harus menunjukkan sikap iman yang jelas. Tetap setia dan tekun kepada iman dan panggilannya sesuai dengan kebenaran yang tumbuh dari hati nurani (*sunei, dhsij*) sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun harus mengalami penganiayaan, siksaan dan penindasan, bahkan sekalipun harus menghadapi kematian. Sebab demikianlah sikap yang diinginkan Allah dari setiap orang yang percaya. Sikap “setia sampai mati” (Why. 2:10) adalah sikap yang tidak ragu-ragu (bnd. Why.3:16), tabah di tengah-tengah keputusan, bahwa pada akhirnya gereja akan menang bersama-sama dengan Kristus (Why.22:5).

Saran-saran

Beberapa saran dari keseluruhan studi dalam tesis ini yang menurut penulis sangat penting adalah:

1. Hubungan gereja dengan pemerintah secara lebih jelas perlu dirumuskan oleh gereja-gereja di Indonesia. Perumusan teologis tidaklah cukup, tetapi mestinya perumusan sikap itu juga sampai kepada garis-garis besar teknis pelaksanaan hubungan gereja dengan pemerintah. Mencakup bidang apa saja yang perlu dikerjasamakan, dan apakah gereja dapat menyepakati agar gereja tanggap dalam menyampaikan suara kenabiannya kepada pemerintah dan bagaimana caranya?
2. Indonesia sebagai negara kesatuan dan dikenal sangat demokratis, tentu pemerintahnya harus lebih tanggap terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam hal ini hak-hak minoritas perlu diperhatikan secara maksimal, sebagai bagian integral dalam pluralitas, dan sebagai salah satu wujud demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia.
3. Perlu ada sikap positif - konfirmatif dan negatif-konfrontatif. Sikap positif-konfirmatif dan negatif-konfrontatif harus bertujuan transformatif : menuju keadaan yang lebih baik bagi Gereja dan segenap warga-bangsa. Karena itu, baik konfirmasi maupun konfrontasi harus membuka ruang yang luas bagi dialog (Gereja dan Pemerintah; Gereja dan umat Kristen; Gereja dan masyarakat; Gereja dan agama-agama lain). Sehingga dengan mengembangkan dialog, sikap *pre judice* semakin tersingkirkan dan keterbukaan untuk saling berbagi dan saling mengisi, semakin terpelihara dengan baik.
4. Perlu ada sikap kritis. Sikap kritis berarti "*to confront*" atau berkonfrontasi dengan pemerintah manakala pemerintah lalai atau menyimpang dari tugasnya. Konfrontasi di sini bukan angkat senjata tentunya, tetapi

mengingatkan atau menegor pemerintah. Landasannya Pancasila dan UUD 1945. Di samping mengingatkan, Gereja bisa bergerak membangun opini publik (melalui media misalnya), bahkan menggerakkan *civil disobedience*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Terjemahan Baru. 2008, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Barclay, William. 1980, *Ambassador Christ : the Life and the Teaching of Paul*.
Edinburgh: Clark.
- Barrett, C.K. 1957, *A Commentary on the Epistle to the Romans*. New York: Harper &
Row.
- Baxter, J. Sidlow. 1992, *Menggali Isi Alkitab: Roma – Wahyu*. Jakarta: Yayasan Bina
Kasih/OMF.
- Beale, G.K. 1984, *The Use of Daniel in Jewish Apocalyptic Literature and in the
Revelation of St. John*. London: University Press.
- Beasley, G.R.-Murray (ed). 1974, *The Book of Revelation*. London: Oliphants.
- Beyer, Herman, W. 1964, “*dia, kono, j*” (*diakonos*) dalam Gerhard Kittel (ed.),
Theological Dictionary of the New Testament, Volume II A-H.
Grand Rapids: Eerdmans.
- Boring, M. Eugene. 1989, *Revelation*. Louisville: John Knox Press.
- Bornkamm, Gunter. 1969, *Paul*. New York: Harper & Row.
- Brink, H.v.d. 1989, *Tafsiran Alkitab Kisah Para Rasul*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Bruce, F.F. 1980, *New Testament History*. New York: A Doubleday Galilea Book.
- Caird, G.B. 1966, *A Commentary on the Revelation of St. John the Divine*. London:
Adam & Charles Black.
- _____, 1971, *The Revelation of St. John the Divine*. London: Adam &
Charles Black.

- Casidy, Richard, J. 1987, *Society and Politics in the Acts of the Apostles*. New York: Maryknoll.
- Chilton, Bruce. 1994, *Studi Perjanjian Baru bagi Pemula*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Cranfield, C.E.B. 1979, *The International Critical Commentary Romans: Volume II, IX-XVI* (J.A. Emerton.ed.). Edinburgh: Clark.
- _____, 1985, *A Shorter Commentary Romans, Vol.II*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Crawford, James. 1993, "Hak-hak Rakyat atau Pemerintah" dalam *Hak-hak azasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, penyunting T. Mulia Lubis. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Cullmann, Oscar. 1956, *The State in the New Testament*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Darmaputra, Eka. 1988, *Pancasila Identitas dan Modernitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- de Heer, J.J. 1996, *Wahyu Yohanes*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Dodd, C.H. 1959, *The Epistle of Paul to the Romans*. London & Glasgow: Collins Clear Type Pressed.
- Dunn, James. D.G. 1988, *Word Biblical Commentary Romans 9-16*. Dallas Texas: Word Books Publisher.
- Filson, Floyd, V. 1952, *A New Testament History : the Story of Emerging Church*. Westminster : Philadelphia.
- Fiorenza, Elisabeth Schussler. 1982, *Proclamation Commentaries Revelation: Vision of a Just World*. Minneapolis: Fortress Press.

- _____, 1985, *The Book of Revelation Justice and Judgment*. Philadelphia: Fortress Press.
- Ford, J. Massyngberde. 1975, *The Anchor Bible Revelation*. New York: Doubleday & Company.
- Glasson, T.F. 1965, *The Revelation of John: Commentary*. Cambridge: The University Press.
- Gonzalez, Catherine Gunsalus. 1997, *Revelation*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press.
- Groenen, C. 1991, *Pengantar ke dalam Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius.
- Guthrie, Donald. 2009, *Pengantar Perjanjian Baru*. Surabaya: Momentum.
- Hagelberg, Dave. 1996, *Tafsiran Roma*. Bandung: Kalam Hidup.
- _____, 2005, *Tafsiran Kitab Wahyu*. Yogyakarta: Andi.
- Hengel, Martin. 1979, *Acts and the History of Early Christianity*. London: SCM Press.
- Hughes, Philip Edgcumbe. 1990, *The Book of the Revelation A Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Jacob, Tom. 1983, *Paulus, Hidup, Karya dan Teologinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 1985, "Gereja dan Dunia" dalam *Gereja dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 1992, *Iman & Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 1992, "Iman dan Agama", *Kekhasan Agama Kristiani menurut Santo Paulus dalam Surat Galatia dan Roma*. Yogyakarta: Kanisius.

- Jagersma, H. *Dari Alexander Agung Sampai Bar Kokhba: Sejarah Israel 330 SM-135 SM*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Jeremias, Joachim. 1969, *Jerusalem in the Time of Jesus*. London: SCM Press.
- Kasemann, Ernst. 1969, "Principles of the Interpretation of Romans 13", dalam *New Testament Questions of Today*. London: SCM Press.
- _____, 1980, *Commentary on Romans*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Kistemaker, Simon. J. 2009, *Tafsiran Kitab Wahyu*. Surabaya: Momentum.
- Koester, H. 1983, *History and Literature of Early Christianity*. Philadelphia: Fortress.
- Kodhi, S.A. 1989, *Referendum Dalam Negara Demokrasi Pancasila*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Koester, Helmut. 1982, *Introduction to the New Testament*. Philadelphia: Fortress.
- Ladd, G.E. 1972, *A Commentary on the Revelation of John*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Lan, Kwok Pui. 1995, *Discovery The Bible In The Non World*. New York: Orbis Books.
- Lapide, Princhas/Stuhlmacher, Peter. 1984, *Paul Rabbi and Apostle*. Minneapolis: Augsburg.
- Lohse, Eduard. 1976, *The New Testament Environment*. Abingdon: Nashville.
- Lumban Tobing, Darwin. 2007, *Teologi di Pasar Bebas*. Pematangsiantar: L-SAPA, 2007.
- Ludwig, Charles. 1976, *Para Penguasa pada zaman Perjanjian Baru*. Bandung: Kalam Hidup.
- Marxsen, Willi. 1968. *Introduction to the New Testament*. Philadelphia: Fortress Press.
- _____, 2003, *Pengantar Perjanjian Baru: Pendekatan Kritis terhadap masalah-masalahnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Meeks, Wayne, A. 1983, *The First Urban Christians The Social World of the Apostle Paul*. London: Yale University Press.
- Moo, Douglas. 1996, *The Epistle to the Romans, The International Commentary on the New Testament*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Morrison, Clinton. 1960, *The Powers that Be: Earthly Rulers and Demonic Powers in Romans 13: 1-7*. Alec R. Allenson: Naperville.
- Mounce, Robert, H. 1998, *The Book of Revelation*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Mulyono, Y. Bambang. 1996, *Teologi Kitabahan, Ulasan atas Kitab Wahyu Johannes*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Montgomeiy. 1950, *A Critical and Exegetical Commentary On the Book of Daniel*, ICC. New York: Charles Scnbner's Sons
- Newman, Barclay, M. 1993, *Kamus Yunani-Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Rowland, Christopher, C. 1998, *The New Interpreter's Bible, Volume XII*. Nashville: Abingdon Press.
- Russell, D.S. 1978, *Apocalyptic Ancient and Modern*. London: SCM Press.
- Sairin, Weinata – J.M. Pattiasina (ed.).1994, *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- _____, 2000, *Gereja Agama-agama & Pembangunan Nasional*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Scott, E.F. 1940, *The Book of Revelation*. London: SCM Press.
- Sherwin, A.N – White. 1965, *Roman society and Roman Law in the New Testament*. Clarendon : Oxford.
- Simatupang, T.B. 1967, "Revolusi yang belum selesai" dalam *Tugas Kristen dalam Revolusi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- _____, 1989, *Iman Kristen dan Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sinaga, Martin. L.dkk. 2001, *Pergulatan Kehidupan Kristen di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sperry, Sidney, B. 1987, *Paul's Life and Letters*. Salt Lake City, Utah: Bookcraft.
- Strathmann, H. 1985, "*leitourgoi*"(*leiturgoi*) dalam Gerhard Kittel (ed.) *Theological Dictionary of the New Testament, Abridged in One Volume*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Suharyo, I. 1993, *Kitab Wahyu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sularto. 1999, *Refleksi Agenda Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sweet, John. 1979, *Revelation*. London: SCM Press.
- Tenney, Merrill. C. 1991, *Interpreting Revelation*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Thayer, Joseph. H. 1995, *Greek English Lexicon of the New Testament*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Thayer, Joseph. H. 1989, *A Greek English Lexicon of the New Testament Complete and Unabridged*. New York:
- Thomas, Robert. L. 1995, *Revelation 8-22: An Exegetical Commentary*. Chicago: Moody.
- Torrey, Charles, C. 1958, *Apocalypse of John*. London: Yale University Press.
- van den End, 1982, *Harta Dalam Bejana*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- _____, 2003, *Tafsiran Alkitab: Surat Roma*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Verkuyl, J. 1987, *Ras: Bangsa: Gereja: Etika Politik*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- van Daalen, David,H. 1986, *A Guide to the Revelation*. London: SPCK Press.
- Wernecke, Herbert, H. 1964, *The Book of Revelation Speaks to Us*. Philadelphia: The Westminster Press.

Wilckens, U. 1985, “caragma” dalam *Theological Dictionary of the New Testament*,
abridged in one Volume, editor: Gerhard Kittel dan Gerhard
Friedrich. Grand Rapids: Eerdmans.

Witherington, Ben, III. 2003, *Revelation*. Cambridge: University Press.

Yewangoe, A.A. 1994, “Beberapa catatan mengenai hubungan gereja dan negara”
dalam Weinata Sairin-J.M. Pattiasina “*Hubungan Gereja Dan
Negara Dan Hak Asasi Manusia*”. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

_____, 1999, *Partisipasi Kristen dalam Era Baru dalam Gereja dan
Reformasi*. Jakarta: Yakoma PGI.

_____, 2009, *Tidak Ada Negara Agama, Satu Nusa Satu Bangsa*. Jakarta:
BPK Gunung Mulia.

Young, Edward.J. 1949, *The prophecy of Daniel*. Grand Rapids: Eerdmans.

Ziesler, John. 1990, *Paul’s Letter to the Romans*. London : SCM Press.

Artikel-artikel

Ambarita, Victor. 2010, “Warga HKBP Filadelfia Terlunta-lunta”, *Majalah Suara
HKBP, Edisi 57*.

_____, 2010, “Ephorus HKBP Bertemu Walikota Bekasi”, *Suara HKBP*.

Cholil, Suhadi, dkk. 2010, “Sumber Ketegangan: Rumah Ibadah dan Wacana
Penyesatan” dalam *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di*

Indonesia 2009, Center For Religius & Cross-Cultural Studies,
CRCS. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

Laporan, “Krisis Identitas atau Bangkitnya Keesaan Gereja” dalam majalah bulanan
Kairos, No. 9 Tahun I, September 1993.

GBHN : Ketetapan MPR RI, No II/MPR/1993, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Tindak Kekerasan terhadap Kebebasan Beragama, *Kompas*, 12 September 2010.

Kisah Perjalanan HKBP Ciketing, *Kompas*, 14 September 2010.

Yewangoe, A.A. PBM Bukan Peraturan Majelis-majelis Agama, dalam “*Berita
Oikumene*”, November 2010.

Website

<http://www.zikri.com/2010/09/18>, diakses 3 Januari 2011.

<http://regional.lompas.com/read/2010/03/11/21564792>, diakses 3 Januari 2011.

<http://www.antaraneews.com/berita/1293238879>, diakses 3 Januari 2011.